

**GAMBARAN IMPLEMENTASI KAMAR RAWAT INAP
STANDAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI RSU PRASETYA BUNDA
KOTA TASIKMALAYA**

SKRIPSI



Disusun oleh :
Putri Sari Dewi
NIM 11016122016

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
AGUSTUS 2026**

**GAMBARAN IMPLEMENTASI KAMAR RAWAT INAP
STANDAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI RSU PRASETYA BUNDA
KOTA TASIKMALAYA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan (S.Kes)**



Disusun Oleh :
Putri Sari Dewi
NIM : 110161122016

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
TASIKMALAYA
AGUSTUS 2026**

UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

Skripsi, Agustus 2026
Putri Sari Dewi

Gambaran Implementasi Kamar Rawat Inap Standar Program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Prasetya Bunda Kota Tasikmalaya

xvii + 109 halaman + 2 tabel + 12 lampiran.

Abstrak

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dalam peraturan ini disebutkan bahwa peserta BPJS kesehatan yang menjalani rawat inap akan mendapatkan fasilitas ruang perawatan sesuai dengan standar kamar rawat inap. Meskipun kebijakan KRIS sudah ditetapkan, tapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang rumit, baik dari sisi teknis maupun non teknis, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, hambatan regulasi hingga resistensi dari berbagai pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kamar rawat inap standar dengan empat faktor implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi. Informan penelitian berjumlah 5 informan dengan penetapan informan kunci dan informan spesialis yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi untuk kebijakan disampaikan melalui alur yang berjenjang mulai dari instansi pemerintah hingga ke pihak rumah sakit, sumber daya dalam implementasi kebijakan yakni tim KRIS, anggaran khusus, kewenangan melalui SK pembentukan tim, sarana dan prasarana, sikap pelaksana (disposisi) menunjukkan bahwa adanya sikap positif dari berbagai jenjang pelaksana di rumah sakit dan struktur birokrasi disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap anggota namun tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk pelaksanaan kebijakan. Disimpulkan bahwa faktor komunikasi merupakan dasar terbentuknya komitmen dari para pelaksana, faktor sumber daya merupakan faktor pendukung keberhasilan, faktor disposisi merupakan faktor penentu implementasi dan struktur birokrasi merupakan faktor pendukung keberhasilan walaupun tidak terdokumentasi dengan baik.

Kata Kunci : Perpres No. 59 Tahun 2024, Implementasi kebijakan, Rumah Sakit
Kepustakaan : 41 (2016 – 2026)

BAKTI TUNAS HUSADA UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
BACHELOR'S PROGRAM IN HOSPITAL ADMINISTRATION

Skripsi, August 2026
Putri Sari Dewi

An Overview of the Implementation of Standard Inpatient Rooms Under the National Health Insurance Program at Prasetya Bunda General Hospital in Tasikmalaya City

xvii + 109 page + 2 table + 12 attachment.

Abstract

The government has issued Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 of 2024 regarding the third amendment to Regulation No. 82 of 2018 concerning health insurance, this regulation stipulates that BPJS Kesehatan participants undergoing inpatient care will receive room facilities in accordance with the Standard Inpatient Room (KRIS) standards. Although the KRIS policy has been established, its implementation faces complex challenges both technical and non-technical ranging from infrastructure limitations, a lack of human resource readiness, and regulatory hurdles to resistance from various stakeholders. This study aims to examine the implementation of the standard inpatient room policy through four policy implementation factors: communication, resources, implementer attitudes (disposition), and bureaucratic structure. The study involved five informants comprising key informants and specialists selected using purposive sampling. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, documentation review, and triangulation. The results indicate that policy communication flowed through a tiered structure from government agencies to hospitals, resources included the KRIS team, a dedicated budget, authority granted via team formation decrees, and facilities/infrastructure, implementer attitudes (disposition) showed a positive response across various levels of hospital staff and the bureaucratic structure was organized based on individual member competencies, although there were no specific standard operating procedure (SOP) for policy execution. It is concluded that communication formed the basis for implementer commitment, resource supported success, disposition was a determining factor for implementation and bureaucratic structure supported success, despite a lack of proper documentation.

Keywords : Presidential Regulation No. 59 of 2024, Policy Implementation, Hospital.

References : 41 (2016 – 2026)